

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ali Mufliz, *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*, Karunika, Jakarta, 1998
- W. Friedman, *Legal Theory*, Steven & Son Limited, London, 1960
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum (Transformatif-Partisipatoris)-Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015
- Ateng Syafrudin, *Butir-butir bahan Telaahan Tentang AAUPL untuk Indonesia, dalam Paulus Efendi lotulung, "Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013
- Budi Mulyono (*et.all*), *Analisis Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung No : 03/G/2013/PTUN-BL*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014
- Epicurus dalam Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cet. XI, 2011
- Goenawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah & Properti*, Best Publisher Cet. I, Yogyakarta, 2009
- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985
- Indroharto, 2005, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku III Pustaka Harapan, Jakarta
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Jakarta, 2004
- Ispriyarso, *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam S.F Marbun dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2001
- Mahmud MD , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004
- Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003

- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Tata Usaha Negara*, Fajar Agung, Jakarta, 199
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- R wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar grafika, Jakarta, 2008
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Cetakan II, Yogyakarta, 2001
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung
- S.F.Marbun , *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (suatu pengantar)*”, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Kencana, Jakarta, 2014
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undag-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 98/G/2015/PTUN.BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower

C. LAIN-LAIN

1. Makalah

Mas Achmad Santosa, *Gerakan Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, vol.01/issue01/Januari 2014, Indonesian Centre of Environmental Law (ICEL), Jakarta hlm, 26

2. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009),

2. Website

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/323582-pembatalan-imb-hotel-salak-tower-bogor-diharapkan-jadi-pembelajaran-pemkot.html>, diunduh pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 19.30 WIB

<http://eprints.uns.ac.id/3360/1/175331901201108541.pdf>, diunduh pada 29 Mei 2017, pukul 03.00 WIB

<http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/hambatan-pelaksanaan-putusan-peradilan-tata-usaha-negara-yang-mengakibatkan-hilangnya-wibawa-ptun/>, diunduh pada 29 Mei 2017, pukul 03.00 WIB

Fahmiron, *INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI WUJUD INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS KEKUASAAN KEHAKIMAN. LITIGASI, [S.IP]*, v. 17, n.2, p. 3472, ok. 2016. ISSN 2442-2274. Available at: <http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/158> . Date accessed: 26 jan. 2017.